

**LAHIRNYA KABUPATEN DHARMASRAYA:  
ANALISIS HISTORIS PEMEKARAN WILAYAH DI SUMATRA BARAT  
(1999–2004)**

Romi Arif

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas

Alamat e-mail : [romiarif@hum.unand.ac.id](mailto:romiarif@hum.unand.ac.id)

**ABSTRACT**

*Dharmasraya Regency is one of the newly established autonomous regions in West Sumatra Province, formed through the division of Sawahlunto/Sijunjung Regency. This article examines the process of Dharmasraya's formation, focusing on the background of the idea for regional expansion, the accompanying socio-political dynamics, and the role of local elites in advocating for the establishment of the regency. This study employs historical research methods, including heuristic stages, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that the creation of Dharmasraya Regency was driven not only by administrative needs but also by factors such as development disparities, the region's economic potential, and the political aspirations of the local community. Despite various obstacles encountered during the formation process, the persistence of local elites played a significant role in shaping the future development of Dharmasraya.*

*Keywords: Dharmasraya; regional expansion; regional autonomy; West Sumatra; decentralization*

**ABSTRAK**

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Artikel ini mengkaji proses lahirnya Kabupaten Dharmasraya dengan fokus pada latar belakang munculnya ide pemekaran, dinamika sosial politik yang menyertainya, serta peran para elite lokal dalam mendorong pembentukan kabupaten tersebut. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya Kabupaten Dharmasraya tidak hanya didorong oleh kebutuhan administratif, tetapi juga oleh faktor ketimpangan pembangunan, potensi ekonomi kawasan, dan aspirasi politik masyarakat lokal. Meskipun terdapat berbagai hambatan yang menyertai proses pembentukan kabupaten ini, kegigihan para elite lokal telah memberikan hasil yang signifikan bagi perkembangan wilayah Dharmasraya di masa depan.

Kata Kunci: Dharmasraya; pemekaran wilayah; otonomi daerah; Sumatera Barat; desentralisasi

## **A. Pendahuluan**

Era Reformasi menjadi titik awal pergeseran paradigma sentralisasi yang dianut oleh rezim Orde Baru. Runtuhnya pemerintahan otoriter tersebut membuktikan bahwa kekuasaan Soeharto, yang selama ini terkesan solid dan tak tergoyahkan, ternyata hanya menciptakan ketahanan yang bersifat semu. Sebab, ketika rezim ini tumbang, berbagai kebijakan dan wacana pun bermunculan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wacana yang berkembang adalah otonomi daerah, sebagai bentuk praktik demokrasi di ranah yang lebih kecil (Nordholt & Van Klinken, 2007; Mayrudin, 2018; Suriadi et al., 2023).

Ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan, tuntutan pelaksanaan otonomi daerah bergulir dengan cepat di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, beberapa daerah seperti Aceh, Riau, dan Papua mengajukan tuntutan yang melampaui sekadar otonomi daerah, yakni tuntutan kemerdekaan atas wilayah mereka (Jayanti, 2013; Hasanudin, 2016; Nurhasim, 2016; Rozi, 2016; Kaisupy & Maing, 2021). Menurut Gusti Asnan, tuntutan-tuntutan tersebut sejatinya merupakan "lagu lama" yang kembali dinyanyikan pada masa Reformasi. Baik tuntutan otonomi daerah maupun tuntutan kemerdekaan sebenarnya telah muncul sejak era 1950-an. Salah satu contoh historisnya adalah peristiwa Dewan Banteng di Sumatra Barat, yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan PRRI (Asnan, 2006).

Pada masa Reformasi, Sumatra Barat merespons semangat otonomi daerah dengan munculnya tuntutan pemekaran wilayah di sejumlah kabupaten. Di Samudra Hindia, masyarakat Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan menuntut pemekaran wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman (Hutahean, 2021; Surya, 2025). Di pesisir barat Sumatra, masyarakat Air Bangis, Sasak, Kinali, hingga Talu, bersatu untuk memisahkan diri dari Kabupaten Pasaman. Di Muara Labuh, Sungai Pagu, dan Rantau XII Koto, menuntut pemekaran wilayah dari Kabupaten Solok. Sementara itu, di Ranah Cati Nan Tigo, masyarakat Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, dan Sungai Rumbai saling bahu-membahu untuk melepaskan diri dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan membentuk identitas baru sebagai Kabupaten Dharmasraya (Hendri, T.T.; Zaini, 2006; Arif, 2019).

Lahirnya Kabupaten Dharmasraya tentu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui dinamika sosial-politik yang kompleks. Proses pemekaran ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi, melibatkan beragam aktor lokal, aspirasi masyarakat, serta pertimbangan administratif dan politik dari pemerintah pusat. Ketegangan pun kerap muncul dan sempat mengarah pada ancaman demonstrasi akibat tarik ulur pemekaran wilayah oleh pemerintah kabupaten induk. Bahkan, Kecamatan Kamang Baru, yang sejak awal telah menyatakan kesiapan

untuk bergabung dengan Dharmasraya, secara tiba-tiba tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas proses terbentuknya Kabupaten Dharmasraya dalam perspektif kajian historis. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pemekaran wilayah, jalannya proses pemekaran, insiden-insiden yang menyertainya, serta peran elite-elite lokal yang terlibat dalam proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai sejarah lahirnya Kabupaten Dharmasraya, sekaligus menawarkan rekomendasi yang relevan bagi kebijakan pemekaran wilayah di masa mendatang.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penulisan sejarah, penggunaan metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting karena menjadikan sejarah sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat ilmiah. Louis Gottschalk menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan masa lampau, yang dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri atas empat tahapan utama, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1985).

Pada tahap heuristik, penulis melakukan pengumpulan data dan

informasi yang berkaitan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Dharmasraya. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara. Wawancara difokuskan pada beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, penulis juga mewawancarai narasumber lain yang dianggap kompeten dan relevan dengan tema penelitian ini, baik dari kalangan adat, pemerintahan, maupun akademisi lokal. Selain penelitian lapangan, penulis juga melakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang mendukung. Studi ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti arsip, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah kritik sumber, yaitu proses menilai keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh. Tahap ini dilanjutkan dengan interpretasi, yakni menafsirkan data yang telah dinilai valid dan relevan untuk memahami makna di balik fakta sejarah. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan sejarah. Pada tahap ini, penulis menyusun hasil interpretasi ke dalam bentuk narasi sejarah yang berkesinambungan, logis, dan bermakna, dengan memperhatikan alur waktu, hubungan sebab-akibat, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu peristiwa.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Munculnya Ide Pemekaran Wilayah Dharmasraya**

Ide pemekaran Dharmasraya untuk membentuk pemerintahan sendiri sebenarnya telah muncul sejak tahun 1950-an, ketika wilayah tersebut masih tergabung dalam Kewedanaan Batanghari bersama Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Namun, karena alasan yang tidak diketahui secara pasti, pembentukan kabupaten baru tersebut tidak pernah terwujud, bahkan hingga memasuki era Orde Baru.

Penulis memahami bahwa pada masa Orde Lama hingga Orde Baru terdapat berbagai faktor yang menghambat proses pemekaran wilayah di Indonesia. Pada masa Orde Lama, salah satu faktor utama adalah dinamika politik yang tidak stabil. Dalam kurun waktu antara tahun 1950 hingga 1960-an, berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara silih berganti muncul dan mengganggu jalannya pemerintahan. Beberapa contohnya adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), serta Gerakan 30 September (G30S) (Fuar, 1956; Maulida, 2018; Aryasahab, 2023). Oleh karena itu, besar kemungkinan fokus pemerintah pada masa itu lebih diarahkan untuk menjaga kedaulatan

negara daripada membahas hal-hal yang berpotensi menimbulkan sikap kedaerahan.

Pada masa Orde Baru, meskipun dinamika politik dalam negeri cenderung lebih stabil, faktor utama yang menghambat pemekaran wilayah kemungkinan besar adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan stabilitas tersebut melalui penerapan sentralisasi kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan daerah tidak memiliki otonomi yang memadai untuk mengusulkan atau melaksanakan pemekaran wilayah. Di Dharmasraya, hambatan serupa diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya infrastruktur pendukung pemerintahan baru. Bahkan hingga tahun 1977, belum terdapat satu pun fasilitas pemerintah setingkat kabupaten yang berdiri di wilayah ini, baik berupa gedung pemerintahan, rumah sakit, maupun sekolah menengah. Namun, dengan berakhirnya era Orde Baru, secara bertahap hambatan tersebut mulai teratasi. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat Dharmasraya untuk lebih aktif dalam mengusulkan pemekaran wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ketika euforia otonomi daerah semakin meluas ke berbagai wilayah Indonesia, harapan untuk membentuk kabupaten baru yang sempat tertunda hampir setengah abad kembali mencuat pada tahun 1999. Gagasan ini dikemukakan oleh tiga tokoh senior yang berasal dari daerah berbeda di Dharmasraya, yaitu Masrul Maas Datuk Rajo Lelo dari

Koto Padang, Ali Anas Datuk Labuan dari Pulau Punjung, dan Zubir Sutan Bagindo dari Gunung Medan. Berawal dari sekadar “*ota lapau*”, ketiga elite lokal tersebut mengusung wacana pemekaran wilayah dengan tujuan agar pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat Dharmasraya. Dalam pemikiran mereka, keberadaan kabupaten baru diyakini akan mempercepat pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Hendri, T.T.; Zaini, 2006; Arif, 2019).

Alasan yang dikemukakan oleh ketiga tokoh pemekaran tersebut memang masuk akal dan dapat diterima. Dalam hal efisiensi administrasi, misalnya, daerah Pulau Punjung—yang merupakan lokasi terdekat dengan ibu kota Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung—memiliki jarak hampir 100 kilometer dan memerlukan waktu lebih dari dua jam untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan pemerintahan. Jarak tempuh yang lebih lama tentu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, seperti Silago, Timpeh, Padang Laweh, dan Batu Kangkung. Bahkan, mereka harus menginap di Muaro Sijunjung hanya untuk menyelesaikan urusan administrasi tersebut (*Wawancara dengan Amrullah, 12 Desember 2013*).

Dalam hal pembangunan wilayah, kegiatan pembangunan lebih terpusat di kawasan kabupaten induk, sementara daerah-daerah yang berada di wilayah selatan seolah terabaikan. Namun, ketika terdapat hal-hal positif di Dharmasraya, justru

kabupaten induk yang memperoleh pengakuan. Salah satu contohnya adalah istilah *Lansek Manih* yang menjadi representasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Padahal, istilah tersebut lebih tepat digunakan untuk wilayah Dharmasraya karena di kawasan ini memang banyak ditemukan pohon duku, yang oleh masyarakat Dataran Tinggi Minangkabau kerap disebut *lansek* (langsat). Meskipun duku dan langsung adalah buah yang berbeda, faktanya di Dharmasraya memang lebih banyak ditemukan kedua jenis buah tersebut dibandingkan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Selain dua faktor awal yang melatarbelakangi pemekaran wilayah Dharmasraya, terdapat beberapa faktor lain yang kurang mendapat perhatian dari para elite lokal saat itu, yaitu persoalan kesempatan kerja, potensi ekonomi, dan masalah identitas wilayah. Dalam hal kesempatan kerja, terdapat kecenderungan bahwa pegawai pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung umumnya didominasi oleh masyarakat yang berasal dari kawasan utara. Sementara itu, masyarakat dari wilayah selatan jarang memperoleh kesempatan. Meskipun ada beberapa yang berhasil bekerja di pemerintahan, hal tersebut umumnya disebabkan oleh kualitas mereka yang memang di atas rata-rata dan kebanyakan berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Adapun tenaga honorer atau tenaga harian lepas

lebih banyak didominasi oleh masyarakat dari kabupaten induk. Meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi, terdapat semacam stigma di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahwa mengenakan baju dinas dengan simbol pemerintah daerah dapat meningkatkan status sosial mereka (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Di sektor ekonomi, wilayah Dharmasraya dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki beragam peninggalan sejarah, serta terletak di kawasan strategis lintas provinsi, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Catatan Belanda menyebutkan bahwa hampir seluruh sungai yang berada di Dharmasraya mengandung emas dengan kualitas tinggi. Secara spesifik, juga disebutkan bahwa di muara Batang Asam terdapat kandungan batu bara yang masih berwarna coklat pada tahun 1905. Belanda juga mengabarkan jika peninggalan sejarah di Dharmasraya tidak hanya terbatas di Sungai Langsek dan Siguntur, tetapi juga ditemukan di Lubuk Bulang, Sungai Dareh, dan Padang Laweh (*Van den Broek, 1907*).

Pada awal tahun 1990-an, di Dharmasraya telah berdiri beberapa perusahaan perkebunan berskala besar. Namun, selama ini hasil dari pajak perusahaan tersebut lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang berada di pusat pemerintahan, sementara masyarakat Dharmasraya justru lebih merasakan dampak

negatifnya. Dengan terbentuknya pemerintahan baru, seluruh potensi ekonomi tersebut dapat dikelola secara mandiri demi kemakmuran masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemekaran wilayah ini tidak hanya dipandang sebagai langkah strategis dalam pengelolaan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Secara historis, wilayah Dharmasraya memiliki karakteristik yang berbeda dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung secara umum. Pada masa tradisional, wilayah ini dikenal dengan nama Rantau Batanghari atau Rantau Dibaruh, sementara wilayah Sawahlunto/Sijunjung identik dengan sebutan daerah peralihan antara *darek* dan *rantau*. Ketika Belanda datang pada tahun 1877, Dharmasraya menjadi satu-satunya wilayah di daratan Sumatra Barat yang masih berstatus merdeka dan menolak kedatangan Belanda untuk memasuki wilayah tersebut. Bahkan, ketika penguasa Laras Lubuk Tarab (Jambu Lipo) membujuk raja-raja di Dharmasraya untuk menerima kedatangan Belanda, mereka secara tegas menolak dengan nada keras. Setelah wilayah ini ditaklukkan pada tahun 1905, Dharmasraya kemudian disatukan di bawah pemerintahan Distrik Batanghari. Dengan melihat sudut pandang historis ini, memang sewajarnya Dharmasraya berpisah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (*Van Hasselt & Snelleman, 1881; Van*

den Broek, 1907; Heckler, 1910; Arif, 2019).

## **2. Pembentukan Organisasi Persiapan Pemekaran**

Ketika wacana pemekaran wilayah menyebar ke berbagai kampung di Dharmasraya, para elite lokal pun aktif menghimpun tokoh masyarakat hampir di setiap nagari. Di bulan Agustus hingga September 1999, secara rutin gabungan para elite lokal ini secara rutin mengadakan berbagai pertemuan dan konsolidasi yang berkesinambungan. Baik para inisiator maupun perintis, mereka bekerja keras dan menunjukkan komitmen tinggi demi mewujudkan terbentuknya kabupaten baru. Sebagai puncak dari rangkaian rapat-rapat kecil tersebut, pada tanggal 25 September 1999 diselenggarakan sebuah pertemuan besar di Hotel Umega, Gunung Medan. Dalam pertemuan ini, terbentuklah sebuah panitia resmi yang diberi nama *Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (BP2KSS)* (Hendri, T.T.; Sayuti, 1999; Zaini, 2006).

Selain pembentukan nama organisasi, pertemuan para elite lokal ini juga menghasilkan sebuah kesepakatan untuk menetapkan nama-nama yang bertanggungjawab dalam struktur kepanitiaan. Jabatan ketua BP2KSS dipercayakan kepada Arlies Ade Datuk Penghulu Sati. Posisi wakil ketua diemban oleh M. Sayuti Datuk Rajo Penghulu dan Syamsuir Sulaiman. Jabatan sekretaris dipercayakan kepada

Amsyaril Darwis, dengan Akmal Malik sebagai wakilnya. Sementara itu, posisi bendahara diemban oleh Adi Gunawan (Hendri, T.T.; Sayuti, 1999; Zaini, 2006).

Pada awalnya, panitia BP2KSS meyakini bahwa pemekaran wilayah Dharmasraya dapat terwujud pada akhir tahun 1999. Namun, gagasan pembentukan kabupaten baru tersebut mengalami penundaan oleh anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan alasan berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan bupati. Meskipun demikian, semangat dan upaya yang telah dilakukan oleh para elite lokal dan tokoh masyarakat Dharmasraya tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus berjuang dan berharap bahwa dalam waktu dekat, cita-cita untuk membentuk pemerintahan sendiri dapat segera terwujud (*Wawancara dengan Amsyaril Darwis, 29 September 2014*).

Rasul Hamidi, salah satu tokoh penting dalam gerakan pemekaran, mengungkapkan bahwa proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di balik perjuangan tersebut, terdapat dinamika internal yang penuh drama dan pengkhianatan. Menurutnya, tuntutan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mungkin tidak akan muncul setelah pemilihan bupati tahun 1999, apabila calon dari Pulau Punjung, Syafrudin Datuk Sangguno—mantan Wali Kota Jakarta Utara—terpilih sebagai bupati. Berdasarkan kalkulasi politik dan proyeksi suara di DPRD

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung saat itu, Datuk Sangguno diperkirakan unggul atas pesaingnya, Darius Affan. Namun, hasil akhir menunjukkan sebaliknya. Beberapa anggota DPRD yang berasal dari wilayah Dharmasraya justru memberikan dukungan kepada Darius Affan. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, mengingat Darius Affan dikenal sering merendahkan masyarakat wilayah selatan dan menyampaikan pernyataan yang bernada meremehkan (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Peristiwa ini menjadi titik balik yang memperkuat tekad para elite lokal Dharmasraya untuk memperjuangkan pemekaran wilayah sebagai jalan keluar dari ketimpangan representasi dan perlakuan yang mereka rasakan selama ini. Pengkhianatan yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD asal Dharmasraya menimbulkan kekecewaan mendalam dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat setempat. Mereka merasa dikhianati oleh para wakil yang seharusnya memperjuangkan kepentingan daerah asal mereka. Kekecewaan ini tidak hanya menciptakan luka politik, tetapi juga memicu perpecahan internal di antara elite-elite lokal serta meningkatkan ketegangan politik di wilayah Dharmasraya. Namun demikian, peristiwa tersebut juga memperkuat motivasi dan tekad masyarakat untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah. Mereka semakin yakin bahwa pemekaran merupakan satu-

satunya jalan untuk memastikan aspirasi dan kepentingan mereka terwakili secara adil dalam sistem pemerintahan (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Pada awal tahun 2002, semangat untuk membentuk kabupaten sendiri kembali menguat di tengah masyarakat Dharmasraya, khususnya dari Kecamatan Koto Baru. Pada tanggal 12 Mei 2002, sejumlah tokoh masyarakat—di antaranya Syafruddin R, Hendri, Muhammad Taridi, Sukardi Datuk Sinaro Mudo, dan Nasution Datuk Sinaro Hitam—menginisiasi pengumpulan tanda tangan dan persetujuan dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan tersebut datang dari ninik mamak, kepala jorong, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dari lima kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Dalam persetujuan tersebut, terdapat sebuah kesepakatan untuk mengadakan pertemuan pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2002, di Masjid Babussalam, Pulau Punjung. Agenda utama rapat ini adalah menghidupkan kembali BP2KSS dan membentuk struktur kepanitiaan yang baru (Hendri, T.T.; Zaini, 2006).

Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Inisiatif untuk mengadakan pertemuan dalam jumlah besar ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat di lima kecamatan. Sayangnya, pada hari yang ditentukan, tidak satu pun perwakilan dari Kecamatan Kamang Baru yang hadir. Hal ini sempat memunculkan beragam spekulasi,

namun tidak menghentikan tujuan utama dari pertemuan akbar tersebut. Dalam struktur baru kepanitiaan BP2KSS, jabatan ketua masih dipercayakan kepada Arlies Ade Datuk Pangulu Sati. Sementara itu, posisi wakil ketua diemban oleh M. Sayuti Datuk Rajo Penghulu dan Abdul Haris Tuanku Sati. Jabatan sekretaris dipegang oleh Muhammad Taridi, dengan Masrigi sebagai wakil sekretaris. Adapun posisi bendahara dipercayakan kepada Masrul Maas Datuk Rajo Lelo, dengan Rasul Hamidi Datuk Saridano sebagai wakil bendahara (*Wawancara dengan Rasul Hamidi*, 21 Oktober 2018).

Dari struktur kepanitiaan BP2KSS “jilid dua” ini, hampir seluruh pengurus lama diganti, kecuali Arlies Ade dan M. Sayuti. Pergantian seperti ini merupakan hal yang wajar dilakukan dalam berbagai organisasi maupun lembaga. Alasan pergantian pun beragam—mungkin karena kesibukan masing-masing, kondisi kesehatan yang mulai menurun, atau bahkan berkaitan dengan isu pengkhianatan anggota DPRD yang pernah dibahas sebelumnya. Namun, dalam kehidupan, “Ada yang hilang, pasti ada yang datang; ada yang pergi, pasti ada pengganti; asalkan jangan pergi, kemudian tak pernah kembali”.

Setelah kepengurusan BP2KSS yang baru disahkan, para elite lokal kembali mengadakan pertemuan di Sungai Dareh dengan mengundang anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berasal dari wilayah selatan. Tampaknya para tokoh ini sudah tidak terlalu

memedulikan isu-isu terkait dugaan pengkhianatan oleh beberapa oknum dewan yang sempat mencuat sebelumnya. Selain anggota DPRD, panitia BP2KSS juga turut mengundang Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Hasan Zaini, yang kebetulan juga berasal dari wilayah selatan. Dalam diskusi terbatas tersebut, beberapa anggota DPRD menyampaikan desakan agar struktur kepengurusan BP2KSS direvisi. Mereka berpendapat bahwa Arlies Ade, yang menjabat sebagai ketua dan dikenal sering mengkritik Darius Affan, berpotensi menghambat proses pemekaran jika tetap dipertahankan dalam posisi tersebut. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 16 Juni 2002 diadakan pertemuan lanjutan di Kantor Pengairan Sedasi, Pulau Punjung. Pertemuan ini kembali dihadiri oleh Wakil Bupati, anggota DPRD dari wilayah selatan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam forum tersebut, Adi Gunawan ditetapkan sebagai ketua BP2KSS yang baru, menggantikan Arlies Ade (Hendri, T.T.; Zaini, 2006).

Penunjukan Adi Gunawan sebagai ketua BP2KSS yang baru tidaklah terlalu mengherankan. Selain pernah menjabat sebagai bendahara dalam kepengurusan sebelumnya, ia juga memiliki modal ekonomi yang cukup untuk mendukung berbagai persiapan dalam proses pemekaran. Selain itu, salah satu tokoh yang pertama kali menggulirkan wacana pemekaran Dharmasraya adalah ayahnya, Zubir Sutan Bagindo. Namun, hal yang patut diapresiasi

dari Adi Gunawan adalah kemampuannya dalam menyatukan berbagai persepsi elite lokal serta menghadapi intervensi dari pihak-pihak yang tidak mendukung pembentukan kabupaten baru ini.

### **3. Lahirnya Kabupaten Dharmasraya**

Setelah Adi Gunawan ditetapkan sebagai Ketua BP2KSS, proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya pun dimulai secara nyata. Langkah pertama yang dilakukan oleh panitia BP2KSS adalah mengirim beberapa utusan ke Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo untuk melakukan studi banding terkait pelaksanaan pemekaran wilayah di kedua daerah tersebut (Hendri, T.T.; Zaini, 2006). Pemilihan Bungo dan Tebo sebagai tujuan studi banding oleh pengurus BP2KSS memang cukup masuk akal. Sebab, Kabupaten Tebo baru saja memisahkan diri dari Kabupaten Bungo dan secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Dharmasraya. Terlebih lagi, pada masa itu perjalanan dilakukan dengan biaya mandiri, sehingga tidak terlalu membebani keuangan para elite lokal. Namun, jika sejak awal biaya perjalanan ditanggung oleh pemerintah, besar kemungkinan para elite lokal tersebut akan memilih lokasi studi banding yang lebih jauh.

Pada dasarnya, studi banding ini bertujuan untuk mempelajari pengalaman serta strategi yang telah diterapkan oleh Kabupaten Tebo dalam proses pembentukan pemerintahan baru. Melalui kegiatan

tersebut, para utusan BP2KSS diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi serta solusi yang berhasil diterapkan dalam proses pemekaran. Beberapa aspek yang mereka pelajari dari perjalanan ke Bungo dan Tebo adalah masalah administratif, hukum, dan teknis yang menjadi syarat penting dalam pembentukan kabupaten baru (Hendri, T.T.; Zaini, 2006).

Selain melakukan studi banding ke Tebo dan Bungo, BP2KSS juga melakukan peninjauan informasi ke berbagai lembaga di tingkat nasional, seperti Departemen Dalam Negeri, DPR RI, dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta. Tugas ke Jakarta dilakukan oleh Adi Gunawan dan Masrigi, yang kemudian bergabung dengan Akmal Malik di sana. Di Jakarta, mereka juga menemui Dasril Datuk Labuan, anggota DPR RI yang berasal dari Dharmasraya. Dalam pertemuan tersebut, Adi Gunawan menyampaikan maksud dan tujuan dari rencana pemekaran. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, disepakatilah bahwa proses pemekaran Dharmasraya akan ditempuh melalui jalur usulan inisiatif DPR RI. Tugas melobi DPR RI dipercayakan langsung kepada Dasril Datuk Labuan yang memiliki banyak relasi di gedung parlemen tersebut. Setelah memperoleh beberapa tanda tangan dari anggota DPR RI, barulah Adi Gunawan dan Masrigi kembali pulang ke Dharmasraya (Hendri, T.T.; Zaini, 2006).

Sepulang dari kunjungan ke Bungo, Tebo, dan Jakarta, panitia BP2KSS mulai menyusun proposal resmi pemekaran. Proposal tersebut memuat berbagai persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, potensi daerah, sumber daya manusia, sumber daya alam, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Dari beragam persyaratan tersebut, terdapat dua hal pokok yang tidak bisa diputuskan hanya oleh panitia BP2KSS, yaitu nama kabupaten dan letak ibu kotanya. Meskipun dalam penyusunan proposal tersebut terdapat beberapa usulan mengenai nama kabupaten baru, belum ditemukan nama yang dianggap tepat untuk mewakili keseluruhan identitas masyarakat Dharmasraya (Hendri, T.T.; Zaini, 2006).

Menurut Rasul Hamidi, setidaknya terdapat lima nama alternatif yang diusulkan saat penyusunan proposal oleh panitia BP2KSS, yaitu Kabupaten Sitiung, Kabupaten Koto Baru, Kabupaten Pulau Punjung, Kabupaten Sijunjung Selatan, dan Kabupaten Sehiliran Sungai Batanghari. Nama Sitiung, Koto Baru, dan Pulau Punjung memang sejak awal telah masuk dalam daftar hitam karena berpotensi besar menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Ketiga nama tersebut mengandung unsur kedaerahan yang kuat. Masyarakat Koto Baru tentu menginginkan agar nama kabupaten baru tersebut adalah Koto Baru, begitu pula dengan

masyarakat Sitiung dan Pulau Punjung. Bahkan, nagari-nagari lain yang tidak disebutkan pun kemungkinan besar akan menginginkan agar nama kampung mereka dijadikan nama kabupaten (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Pilihan yang tersisa saat itu tinggal dua nama, yaitu Sijunjung Selatan dan Sehiliran Sungai Batanghari. Namun, sebagian besar panitia BP2KSS menolak nama Sijunjung Selatan karena pemekaran wilayah seharusnya juga dapat lepas dari bayang-bayang nama kabupaten induk. Sementara itu, nama Sehiliran Sungai Batanghari juga dianggap kurang mewakili, karena tidak semua kecamatan berada di sepanjang Sungai Batanghari. Apalagi istilah Batanghari telah digunakan sebagai nama kabupaten di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, panitia BP2KSS sepakat untuk melemparkan penentuan nama kabupaten ini ke masyarakat luas guna mendapatkan alternatif lain yang lebih representatif (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Pada tanggal 3 Agustus 2002, diadakan rapat akbar di Gunung Medan untuk menentukan nama kabupaten serta lokasi ibu kota dari kabupaten yang akan didirikan. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa nama kabupaten baru adalah Dharmasraya, sebuah nama kuno yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Malayu dari awal abad ke-11 M hingga pertengahan abad ke-14 M. Sementara itu, lokasi ibu kota untuk

sementara diusulkan di Pulau Punjung, dengan catatan bahwa jika lokasi tersebut tidak memungkinkan, maka Gunung Medan akan dijadikan sebagai alternatif. Terlebih lagi, masyarakat Gunung Medan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan lahan seluas 118 hektare sebagai lokasi pembangunan perkantoran (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Secara umum, masyarakat yang hadir menyambut positif penetapan nama Kabupaten Dharmasraya. Nama tersebut dipilih karena dinilai lebih representatif dan mampu mencerminkan identitas seluruh masyarakat di wilayah tersebut, dibandingkan dengan nama-nama lain yang sebelumnya diusulkan. Namun, terkait penetapan letak ibu kota, banyak masyarakat sebenarnya lebih memilih Gunung Medan karena dinilai lebih adil secara geografis terhadap wilayah yang akan dimekarkan. Selain itu, nama Gunung Medan juga dianggap lebih populer dibandingkan nama-nama nagari lainnya di Dharmasraya, karena keberadaan Rumah Makan Umega yang menjadi tempat persinggahan bus-bus di Jalan Raya Lintas Sumatra (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Jika dilihat dari perspektif historis, penunjukan Pulau Punjung sebagai ibu kota Kabupaten Dharmasraya memang merupakan sebuah kekeliruan. Sebab, sepanjang sejarahnya, Pulau Punjung tidak pernah menjadi pusat pemerintahan wilayah Dharmasraya. Pada masa Hindia Belanda, misalnya, sejak

tahun 1910, yang menjadi ibu kota Dharmasraya (saat itu bernama Distrik Batanghari) adalah Sungai Dareh, meskipun beberapa tahun sebelumnya juga pernah berada di Koto Baru dan Koto Besar. Namun, jika ditelusuri lebih jauh lagi, pada abad ke-11 hingga ke-14, ibu kota Dharmasraya adalah Padang Roco. Akan tetapi, karena lokasinya yang terisolasi, daerah tersebut tidak dipertimbangkan sebagai ibu kota Dharmasraya modern (Heckler, 1910; Utomo & Istiawan, 2011).

Mengenai pemberian nama "Dharmasraya", terdapat berbagai wacana yang berkembang tentang siapa yang pertama kali mengusulkannya. Bahkan di kalangan panitia BP2KSS sendiri, tidak ada jawaban yang pasti. Menurut penuturan Amsyaril Darwis, nama Dharmasraya pertama kali dikemukakan oleh Syamsuir Sulaiman, seorang tokoh masyarakat dari Tiumang. Namun, menurut Rasul Hamidi, usulan tersebut berasal dari Mawardi Idris, tokoh masyarakat dari Koto Tuo. Terlepas dari siapa yang pertama kali memunculkan nama Dharmasraya, dalam pandangan penulis, ia adalah sosok yang memahami sejarah dan tidak terpaku pada nama-nama yang merujuk pada kabupaten induk. Sebab, dari tiga kabupaten yang terbentuk di Sumatra Barat pada tahun 2004, Dharmasraya merupakan satu-satunya yang menggunakan nama berbeda, tanpa unsur kabupaten induk, dan secara luar biasa berhasil keluar dari identitas *Minangkabauisme*.

Setelah seluruh berkas pemekaran dinyatakan lengkap, panitia BP2KSS segera mengajukan usulan resmi pembentukan Kabupaten Dharmasraya kepada pihak yang berwenang. Proses pengajuan dimulai dari tingkat lokal, di mana panitia BP2KSS terlebih dahulu menyampaikan permohonan dan memperoleh persetujuan dari DPRD serta Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Selanjutnya, surat permohonan diteruskan ke DPRD dan Gubernur Sumatra Barat, kemudian dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan rekomendasi dan persetujuan dari berbagai tingkat pemerintahan, serta mempertimbangkan kelayakan wilayah dari segi administratif, geografis, dan potensi sumber daya, permohonan pemekaran akhirnya mendapat persetujuan dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Persetujuan tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Solok Selatan (Hendri, T.T.; Zaini, 2006).

Dari seluruh rangkaian usulan resmi pembentukan Kabupaten Dharmasraya, tantangan terbesar terjadi di tingkat kabupaten. Bupati Sawahlunto/Sijunjung saat itu, Darius Affan, menunjukkan keberatan terhadap pemisahan wilayah selatan. Ia kerap mengulur waktu dan tampak enggan menandatangani surat persetujuan pembentukan kabupaten baru. Situasi mulai berubah ketika muncul ancaman dari Rasul Hamidi

bahwa massa dalam jumlah besar akan melakukan unjuk rasa di kantor bupati apabila Darius Affan tetap bersikukuh menolak menandatangani surat tersebut. Tekanan dari pemimpin nagari dengan masa jabatan terlama di Sumatra Barat ini akhirnya memaksa Darius Affan untuk menandatangani surat persetujuan pemekaran (*Wawancara dengan Rasul Hamidi, 21 Oktober 2018*).

Berkat kegigihan seluruh unsur yang terlibat dalam proses pemekaran wilayah Dharmasraya, akhirnya pada hari Rabu, 7 Januari 2004, panitia BP2KSS bersama sejumlah elite lokal diundang untuk menghadiri acara peresmian Kabupaten Dharmasraya di Jakarta. Peresmian ini berlangsung di Kantor Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan dilaksanakan bersamaan dengan peresmian 23 kabupaten/kota hasil pemekaran dari berbagai daerah di Indonesia. Acara tersebut diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, atas nama Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Tiga hari setelah itu, dilaksanakan pelantikan Pejabat Bupati Kabupaten Dharmasraya, yaitu Ahmad Munawar. Pelantikan ini dilakukan oleh Gubernur Sumatra Barat, Zainal Bakar, atas nama Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno. Sejak saat itu, roda pemerintahan Kabupaten Dharmasraya mulai bergerak secara resmi (Hendri, T.T.; Zaini, 2006)

#### **D. Kesimpulan**

Lahirnya Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah pasca-Reformasi. Gagasan pemekaran ini muncul sebagai respons terhadap ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses pelayanan publik, potensi ekonomi, serta minimnya representasi politik masyarakat wilayah selatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Dukungan luas dari elite lokal dan berbagai elemen masyarakat menjadi fondasi kuat dalam mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) ini.

Pembentukan Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (BP2KSS) menjadi titik awal konsolidasi gerakan pemekaran. Melalui studi banding, lobi politik, penyusunan proposal, dan penggalangan dukungan dari tingkat lokal hingga nasional, perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika internal dan resistensi dari pemerintah kabupaten induk, semangat masyarakat Dharmasraya tidak pernah surut. Puncaknya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dan peresmian Kabupaten Dharmasraya pada 7 Januari 2004. Secara umum, pemekaran ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan perjuangan masyarakat Dharmasraya, tetapi juga menjadi contoh penting dalam praktik

demokrasi dan desentralisasi di Indonesia.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Arif, R. (2019). Ragam Peran Pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya (1964-2016). *Thesis*. Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Aryasahab, D. F. (2023). Sejarah PRRI/PERMESTA: Awal Mula Munculnya Otonomi Daerah di Seluruh Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 37-44.
- Asnan, G. (2006). *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Fuar, J. A. (1956). *Peristiwa Republik Maluku Selatan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hasanudin, H. (2016). Anatomi Gerakan Sosial di Riau: Refleksi Atas Dinamika Perlawanan Masyarakat Riau terhadap Negara 1998 – 2001. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(2), 161-175.
- Heckler, F. A. (1910). *Betreffende den toestand van het Gouvernement Sumatra's Westkust loopende van 7 April 1905 – 2 Februari 2010. Memorie van Overgave*.
- Hendri. (T.T). *Sejarah Proses Pemekaran Kabupaten*

- Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya.
- Hutahean, W. S. (2021). Kepemimpinan Transformasional Dalam Pembentukan Provinsi Kepulauan Mentawai. *Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*, 2(1), 43-56.
- Jayanti, K. (2013). Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin Al-Turas*, 19(1).
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 82-98.
- Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 8(2), 174-185.
- Mayrudin, Y. M. (2018). Diskursus Demokratisasi Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Polinter*, 3(2), 1-13.
- Nordholt, H. S., & Klinken, G. V. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhasim, M. (2016). Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). *Journal of Political Research*, 6(1), 85-98.
- Rozi, S. (2016). Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan versus Keindonesian pada Studi Kasus Aceh, Papua, Bali, dan Riau. *Journal of Political Research*, 6(1), 75-84.
- Sayuti, M. (1999). Titik Awal Aspirasi Masyarakat Untuk Pemekaran dan Pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Wilayah Selatan. *Rumusan Rapat*, 25 September 1999.
- Suriadi, H. et al. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193-210.
- Surya, A. (2025). Analisis Game Theory Pada Konflik Politik Lokal Di Kabupaten Mentawai Pada Tahun 1999. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 5(No.2), 11-18.
- Utomo, B. B. & Istiawan, B. (2011). *Menguak Tabir Dharmasraya*. Batusangkar: BPPP Sumatera Barat.
- Van den Broek, P. (1907) Nota over de onafhankelijke Batanghari Districten. *Tijdschrift voor Indische: Taal, Land en Volkenkunde*. Batavia: Albrecht & Co.
- Van Hasselt, A. L., & Snelleman., J. P. (1881). *Reizen in Midden-Sumatra, 1877-1879*. Leiden: E. J. Brill.
- Zaini, H. (2006). *Sejarah Ringkas Dharmasraya*.